

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor industri merupakan hal penting dalam pembangunan nasional. Selain sektor pertanian, peranan sektor industri terhadap pembangunan nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan dari setiap tahunnya. Peranan sektor industri lebih dominan pada negara-negara yang tergolong maju. Karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sektor lain yaitu seperti nilai kapitalisasi modal yang ditanam sangat besar, melahirkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, tidak hanya itu, sektor industri dapat menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Anwar (2007:2) mengemukakan bahwa beberapa negara yang pada dekade 80-an dan 90-an dikenal sebagai *Newly Industrialized Countries* (negara industri baru) di Asia diantaranya Hongkong, Singapura dan Taiwan, merupakan negara-negara yang kontribusi sektor industrinya meningkat secara cepat jauh melebihi sektor pertanian. Di Indonesia, sejak Pembangunan Lima Tahun dicanangkan pada era Orde Baru, kontribusi sektor Industrinya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan sektor Industri di Indonesia ditandai dengan perubahan struktur perekonomian pada kota-kota besar di Tanah Air pada saat itu. Pergerakan sektor Industri yang demikian cepat di kota-kota besar di Indonesia telah membawa Indonesia pada pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan sebesar rata-rata 7% pertahun selama dekade 1970 hingga 1990-an.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki pembangunan dalam sektor industri. Sektor industri yang berkembang di provinsi Jawa barat yaitu sektor industri tekstil (*Garment*). Sekitar 20% sektor industri garment berada di Kabupaten Subang. Banyaknya industri garment yang ada di Kabupaten Subang secara potensial akan berdampak pada penurunan jumlah

pengangguran di Jawa Barat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir dalam (www.bps.go.id) yang diakses pada tanggal 16 Oktober 2014 data ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat pada bulan Februari 2013 ditandai dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja serta penurunan tingkat pengangguran. Pada bulan Februari 2013 jumlah angkatan kerja mencapai 20.388.637 orang, meningkat menjadi 249.979 jiwa dibandingkan dengan Februari 2012 (20.138.658 orang). Penduduk yang bekerja sebanyak 18.573.371 orang, bertambah 403.719 orang dibandingkan Februari 2012 dengan jumlah penduduk bekerja 18.160.652 orang. Di sisi lain, jumlah penganggur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan. Pada bulan Februari 2013 terjadi penurunan 153.740 orang, yaitu dari 1.969.006 orang pada Februari 2012 menjadi 1.815.266 orang pada Februari 2013. Dengan demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi Jawa Barat pada bulan Februari 2013 juga menurun sekitar 0,88 persen dibandingkan Februari 2012 yaitu 9,78 persen menjadi 8,90 persen. Akan tetapi jika dibandingkan dengan TPT di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 1,89 persen, maka TPT Provinsi Jawa Barat masih terbilang tinggi untuk skala TPT di tingkat nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih terbilang tinggi menjadi tugas penting bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menekan tingginya angka pengangguran. Salah satu cara dalam menekan angka pengangguran yaitu dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia menjadi aset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal, dan informal. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

Pasal 1 ayat (10) satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ayat (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ayat

(12) Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan ayat (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Menurut Sudjana (2001:22) ketiga jalur pendidikan yaitu formal, non formal, dan informal perlu diperjelas lagi dengan menggunakan kriteria yang dapat membedakan antara pendidikan yang bersifat nonformal dengan pendidikan yang bersifat informal dan formal. Perbedaan antara pendidikan yang program-programnya bersifat nonformal dan informal dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pendidikan yang program-programnya bersifat nonformal, memiliki tujuan dan kegiatan yang terorganisasi, diselenggarakan di lingkungan masyarakat dan di lembaga-lembaga untuk melayani kebutuhan belajar peserta didik. Kedua, pendidikan yang program-programnya bersifat informal, tidak diarahkan untuk melayani kebutuhan belajar yang diorganisasi. Kegiatan yang bersifat informal lebih umum, berjalan dengan sendirinya dan berlangsung didalam lingkungan keluarga, serta melalui media massa, tempat bermain, dan sebagainya.

Pendidikan non formal sebagai salah satu dari tiga jalur sistem pendidikan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berguna sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan nonformal berfungsi untuk mengembangkan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional yang dapat dilakukan melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 poin 4 bahwa :

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.

Salah satu satuan pendidikan nonformal yaitu lembaga kursus dan pelatihan, lembaga ini dapat menjadi wadah bagi sumber daya manusia untuk dijadikan aset tenaga kerja yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan usaha ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5 menyebutkan bahwa :

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dewasa ini, laju pertumbuhan dan perkembangan lembaga kursus dikalangan masyarakat terbilang cepat, hal tersebut tidak terlepas dari tuntutan masyarakat dan dunia kerja. Industri garment memerlukan pegawai yang memiliki keahlian dan keterampilan menjahit. Maka dari itu, diperlukan layanan pendidikan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan dan keterampilan yang bergerak dibidang menjahit pakaian yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan menjahit. Akan tetapi, pada kondisinya di lapangan belum sesuai dengan penyelenggaraan lembaga kursus yang semestinya. Faktor biaya menjadi salah satu penyebab terjadinya pasang surut dalam melaksanakan kegiatan kursus. Banyak lembaga kursus hanya berjalan ketika ada unsur penunjang atau adanya dana yang turun ketika mengajukan proposal. Berjalan atau tidaknya suatu lembaga kursus tidak hanya tergantung kepada unsur biaya saja, yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kursus yaitu pengelolaan lembaga baik dalam melaksanakan kegiatan kursus atau pun dalam mendidik peserta didiknya untuk bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten.

Pelaksanaan kegiatan kursus dikalangan masyarakat masih ditemukan beberapa kendala salah satunya penempatan kerja lulusannya. Kebanyakan lembaga kursus lepas tangan ketika peserta didiknya sudah lulus dan memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan di lembaga kursus tersebut. *Tilaar (1998)* memaparkan bahwa *pertama*, tidak optimalnya penyerapan lulusan kursus pada lapangan kerja yang ada yang mana masih ada lulusan kursus yang belum bekerja karena ketatnya persaingan di dunia industri. *Kedua*, kualifikasi lulusan kursus masih belum memenuhi standar industri, hal ini teridentifikasi pada saat peserta kursus mengikuti magang pada perusahaan-perusahaan mitra. *Ketiga*, belum terciptanya kemitraan antara lembaga kursus dan industri untuk menjembatani kesenjangan yang ada. Kemitraan yang terjalin pada saat ini belum mencapai suatu kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak, dimana pihak industri masih merasa terbebani dengan adanya kegiatan magang diperusahaan. *Keempat*, dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk memenuhi kompetensi yang ada. Kesadaran dan keinginan dari lembaga kursus untuk meningkatkan profesionalisme lembaganya masih terkendala dari segi hal pembiayaan yang cukup besar. Akan tetapi, tidak semua lembaga kursus sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh *Tilaar*. Salah satu lembaga kursus yang bergerak di bidang menjahit yaitu Lembaga Kursus dan Pelatihan Ikhtiar kemajuan.

Lembaga kursus Ikhtiar Kemajuan didirikan untuk menekan angka pengangguran di Jawa Barat khususnya di Kota Subang. Berdasarkan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik selama kurun waktu satu terakhir sebanyak 570 ribu orang atau sekitar 4,01% masyarakat bekerja di bidang industri. Data tersebut diperkuat oleh hasil survey yang dilansir dalam (<http://green.kompasiana.com/iklim/2011/06/01/subang-kota-garmen-369413.html>). Dunia perindustrian yang ada di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar terletak di Kabupaten Subang dan bergerak di bidang Industri Garment. Karena kabupaten Subang merupakan kabupaten yang masih terbuka lahan zona industri \pm 80% dari 11.250 ha.

Peserta kursus menjahit di LKP Ikhtiar Kemajuan yaitu rata-rata lulusan SMP. Karena berdasarkan data yang didapat sekitar 90% siswa memilih untuk bekerja di pabrik garment daripada harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Alasan peserta kursus mengikuti kegiatan kursus menjahit adalah kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dan kebutuhan akan *skill* atau keterampilan untuk bekerja di perusahaan karena berada dilingkungan perindustrian. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengelola lembaga tersebut bahwa lulusan mampu diserap oleh perusahaan-perusahaan garment yang ada di lingkungan sekitar LKP tersebut. LKP ini telah banyak meluluskan peserta kursus, rata-rata lulusan dari LKP tersebut yaitu bekerja langsung diperusahaan-perusahaan garment yang berada dilingkungan lembaga tersebut. Lembaga yang berhasil adalah lembaga yang memiliki manajemen yang baik dari mulai perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pembinaan, dan penilaian.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka kita dapat melihat pengelolaan lembaga kursus menjahit untuk menyiapkan lulusannya sehingga dapat diterima oleh perusahaan-perusahaan. Dan bagaimana pengelola terus mengeksistensikan lembaga kursus dikalangan masyarakat terlepas dari faktor biaya. Tidak hanya itu, sedikit sekali lembaga kursus yang menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar jika perusahaan tersebut tidak menerima keuntungan dari lembaga itu sendiri. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang bagaimana efektivitas pengelolaan kursus dan pelatihan menjahit dalam meningkatkan kompetensi lulusan.

B. Identifikasi Masalah

Melihat dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Banyaknya industri garment di Kabupaten Subang telah membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat yang masih pengangguran.
2. Bekerja di pabrik garment diperlukan keahlian menjahit. Maka dari itu diperlukan layanan pendidikan yang berbasis terhadap kebutuhan peserta

didik. Layanan pendidikan yang menyediakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik yaitu Lembaga Pendidikan Keterampilan Ikhtiar Kemajuan.

3. Lembaga Pendidikan Keterampilan Ikhtiar Kemajuan bergerak di bidang Menjahit garment, Mekanik garment, Cutting/memotong, dan Quality control.
4. Lembaga ini telah menciptakan orang-orang yang ahli dalam bidang menjahit dan telah meluluskan sebanyak 500 orang setiap tahunnya.
5. Adanya peran pengelola lembaga kursus dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada lulusan untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja. Disamping itu, perusahaan menjalin kemitraan dengan lembaga kursus dan pelatihan menjahit sehingga lulusan bisa langsung ditempatkan.

C. Perumusan Dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan kondisi diatas, penulis merumuskan masalah yaitu *bagaimanakah efektivitas pengelolaan kursus menjahit tingkat dasar dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan?* Berdasarkan permasalahan tersebut, maka secara khusus permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pengelolaan lembaga kursus menjahit tingkat dasar di LKP Ikhtiar kemajuan dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan kursus dan pelatihan menjahit?
3. Bagaimana efektivitas kursus dan pelatihan menjahit dalam menciptakan lulusan yang kompeten?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan kursus menjahit tingkat dasar dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan kursus dan pelatihan menjahit dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan kursus dan pelatihan menjahit.
3. Untuk mengetahui efektivitas kursus dan pelatihan menjahit dalam menciptakan lulusan yang kompeten

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih teori dalam hal manajemen kelembagaan yang dapat dikembangkan dalam mata kuliah manajemen pelatihan.

2. Manfaat secara praktisi

- a. Bagi Peneliti diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan lembaga kursus dalam meningkatkan kompetensi lulusan.
- b. Bagi Lembaga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga penyelenggara kursus khususnya untuk meningkatkan kompetensi lulusannya sehingga dapat diterima dalam dunia kerja.
- c. Sebagai bahan kajian bagi pihak yang berminat untuk meneliti lebih lanjut terhadap aspek yang sama dengan kajian yang berbeda.

F. Struktur Organisasi Skripsi

Merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah (2013 : 18) penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima bab guna mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan penulisan, ke lima bab tersebut terdiri atas :

BAB I Pendahuluan, berisikan uraian-uraian yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

- BAB II Kajian Pustaka, merupakan konsep yang melandasi permasalahan penelitian dalam penelitian yang dilakukan.
- BAB III Metode Penelitian, meliputi lokasi metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi dan subjek penelitian, langkah-langkah penelitian, analisis data penelitian dan validitas data.
- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasannya.
- BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan Rekomendasi bagi pihak-pihak terkait atau pembaca pada umumnya guna memberikan masukan.